

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI PESTISIDA PADA PETANI PADI DAN SAWIT DI KABUPATEN SAMBAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Maulana Ansori, Sumar'in, Neli

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ansori.maulana79@gmail.com, neliarifin87@gmail.com,
sumarinasmawi@gmail.com

ABSTRACT

This study was motivated by the importance of pesticide availability as a means of production in supporting agricultural activities, particularly for rice and oil palm farmers. Uneven pesticide distribution, price disparities, limited access, and a lack of information regarding pesticide use can pose problems that affect the sustainability of farming operations. Therefore, a system of pesticide distribution is required that not only ensures product availability but also takes into account aspects of equity, affordability, safety and protection for farmers. The implementation of pesticide distribution to rice and oil palm farmers in Sambas Regency has generally been carried out, but aspects of equitable access, affordability, product availability and the equitable dissemination of information remain crucial to achieving a fair pesticide distribution system. 2) Equity in pesticide distribution, as viewed from the aspects of access, availability, price and service to rice and oil palm farmers in Sambas Regency, can be said to be in place, but is not yet fully optimal, particularly in terms of equitable access, stability of supply, affordability and the quality of service provided to rice and oil palm farmers. 3) Factors supporting and hindering the implementation of equitable pesticide distribution for rice and oil palm farmers in Sambas Regency include, amongst those supporting equitable distribution, the availability of agricultural kiosks or shops, the smooth flow of supplies from distributors, farmers' demand, the availability of information, and farmers' experience. Meanwhile, hindering factors include limited availability of pesticide types, relatively high prices, distance and transport costs, limited technical information, and differences in farmers' economic capacity. These factors indicate that efforts to achieve equitable pesticide distribution require the involvement of various stakeholders, including the government, distributors, retailers, extension workers, farmers' groups, and the farmers themselves. Equitable distribution must be directed towards ensuring that rice and oil palm farmers have more equal opportunities to obtain pesticides suited to their needs, at affordable prices and with adequate service and information.

Keywords: Implementation, Pesticide Distribution, Equitable

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya ketersediaan pestisida sebagai salah satu sarana produksi dalam mendukung kegiatan pertanian, khususnya bagi petani padi dan sawit. Distribusi pestisida yang tidak merata, perbedaan harga, keterbatasan akses, serta kurangnya informasi mengenai penggunaan pestisida dapat menjadi permasalahan yang memengaruhi keberlangsungan usaha tani. Oleh

karena itu, diperlukan distribusi pestisida yang tidak hanya menjamin ketersediaan produk, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keterjangkauan, keamanan, dan perlindungan bagi petani. Implementasi distribusi pestisida kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas secara umum telah berjalan, tetapi aspek pemerataan akses, keterjangkauan harga, ketersediaan produk, serta pemerataan informasi masih menjadi bagian penting dalam mewujudkan distribusi pestisida yang berkeadilan. 2) Keadilan dalam distribusi pestisida ditinjau dari aspek akses, ketersediaan, harga, dan pelayanan kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemerataan akses, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kualitas pelayanan kepada petani padi dan petani sawit. 3) Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi distribusi pestisida yang berkeadilan bagi petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas faktor yang mendukung implementasi distribusi pestisida yang berkeadilan di Kabupaten Sambas meliputi tersedianya kios atau toko pertanian, kelancaran pasokan dari distributor, adanya kebutuhan petani, tersedianya informasi, dan pengalaman petani. Sementara itu, faktor yang menghambat meliputi keterbatasan ketersediaan jenis pestisida, harga yang relatif tinggi, jarak dan biaya transportasi, keterbatasan informasi teknis, serta perbedaan kemampuan ekonomi petani. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan distribusi pestisida yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, distributor, pengecer, penyuluh, kelompok tani, maupun petani itu sendiri. Distribusi yang berkeadilan perlu diarahkan agar petani padi dan petani sawit memiliki kesempatan yang lebih merata untuk memperoleh pestisida yang sesuai kebutuhan, dengan harga yang terjangkau dan pelayanan serta informasi yang memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Distribusi Pestisida, Berkeadilan

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan pilar krusial dalam menjaga ketahanan pangan dan menggerakkan roda perekonomian dalam tingkat nasional hingga daerah¹. Dalam aktivitas budidaya tanaman pangan dan perkebunan, keberadaan produksi pertanian, khususnya pestisida memegang peranan yang vital. Secara terminologi, pestisida adalah semua zat kimia atau bahan lain yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama, penyakit, dan gulma yang merusak tanaman atau hasil pertanian². Penggunaan pestisida yang tepat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko gagal panen, sehingga permintaan di pasar selalu bergerak linier seiring intensitas produksi pertanian.

Keberhasilan pestisida sebagai instrumen mitigasi risiko gagal panen bergantung pada efektivitas sistem distribusinya. Aktivitas ini digunakan sebagai saluran pemasaran yang mengarahkan aliran produk dari produsen hingga

¹ Mubyarto (1989), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, ed. Rev, hlm. 1.

² Kementerian Pertanian RI (2019), *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida*, Bab I, Pasal 1, hlm. 3.

mencapai konsumen akhir³. Dalam lingkup pertanian, tata niaga membentuk rantai distribusi berlapis yang dimulai dari produsen agrokimia, distributor utama tingkat wilayah, sub-agen, hingga kios kecil yang berhadapan langsung dengan petani padi dan kelapa sawit selaku konsumen akhir⁴. Distribusi yang Panjang memicu timbulnya beban biaya transaksi yang tinggi serta rawan distorsi informasi antara pemilik kios dengan petani⁵. Ketidakseimbangan informasi ini menyebabkan petani rentan terjebak membeli produk pestisida tiruan atau kadaluwarsa oleh oknum penjual demi mengejar keuntungan pribadi⁶.

Berdasarkan data kependudukan, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk mencapai 648.307 jiwa, dengan sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup berjumlah 31.82% dari total angkatan kerja yang bekerja secara formal sebagai petani atau pekebun⁷. Dominasi sektor agribisnis didukung dengan ketersediaan Luas Baku Sawah (LBS) tanaman padi sebesar 45.044 hektare yang mencatatkan realisasi luas panen hingga 58.030,8 hektare⁸. Selain tanaman pangan, subsektor perkebunan didominasi oleh komoditas kelapa sawit dengan luas mencapai 61.434,7 hektare, terbagi atas 43.377 hektare lahan milik swasta/negara (perusahaan) dan 18.057,7 hektare lahan milik swadaya/pribadi (pekebun rakyat).

Besarnya lahan pertanian di Kabupaten Sambas menciptakan *market size* agrokimia yang potensial di Kalimantan Barat. Namun, perputaran volume barang dan uang yang besar di sektor pertanian tidak luput dari penyimpangan perilaku ekonomi, baik aspek hukum positif maupun hukum syariat islam. Fenomena penyimpangan tata kelola keuangan di Kabupaten Sambas muncul pada kasus tindak pidana korupsi APBDes di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, dengan kerugian negara mencapai Rp655,9 juta yang merupakan tindakan penggelapan pajak desa yang dipungut dari anggaran negara namun tidak disetorkan oleh oknum aparat⁹. Adanya penyimpangan moral dalam pengelolaan keuangan di tingkat dasar ini mengindikasikan bahwa pengawasan dan penegakkan akuntabilitas ekonomi di wilayah tersebut masih menghadapi celah yang krusial.

³ Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2016), *Marketing Management (15th ed)*, hlm. 515-516.

⁴ W. David Downey & Steven P. Erickson (1992), *Manajemen Agribisnis*, hlm. 185-188.

⁵ Mishra dkk. (2000), *Information Asymmetry and Midstream Supply Chain Relationships*, hlm. 225-230.

⁶ Akerlof, G. A. (1970), *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market mechanism*, hlm. 488-490; Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976), *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*, hlm. 305-307.

⁷ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas (2024), *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas Semester I 2024*, hlm. 12-15.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat (2024), *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024*, hlm. 210-215.

⁹ Polres Sambas & Inspektorat (2025), *Laporan Hasil Kasus Tindak Pidana Korupsi APBDes Desa Tebas Kuala Mengenai Penggelapan Pajak Desa dan Dana Desa*, <https://pontianakpost.jawapos.com/sambas/2508040035/kades-tebas-kuala-jadi-tersangka-dugaan-korupsi-dana-desa>, diakses pada 20 Juli 2026.

Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya kesadaran beragama masyarakat, penerapan prinsip syariah yang tidak hanya terbatas pada sektor keuangan perbankan saja, melainkan merambat ke sektor riil, termasuk pasok agribisnis. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, seluruh aktivitas ekonomi dimulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi harus bersandar pada nilai keadilan ('*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), kejujuran (*amanah*), serta bebas dari unsur yang merugikan (*mudharat*), penipuan (*gharar*), dan eksploitasi (*zhalim*)¹⁰. Distribusi dalam islam tidak sekadar memindahkan barang dari produsen ke konsumen, melainkan sebuah instrument untuk menjamin keadilan ekonomi dan mencegah penumpukan harta pada segelintir pihak (*ikhtikar*)¹¹.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan data literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya dimana informasi yang diambil disesuaikan dengan pokok pembahasan dan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tahap yang sangat penting dalam proses pencapaian tujuan dari suatu kebijakan atau program. Sebuah kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dilaksanakan melalui tindakan yang nyata. Oleh karena itu, implementasi dapat dipahami sebagai proses penerapan suatu kebijakan atau program dengan melibatkan berbagai pihak, sumber daya, serta prosedur yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan salah satu kegiatan penting dalam proses ekonomi yang berkaitan dengan penyaluran barang atau jasa dari pihak yang menghasilkan kepada pihak yang membutuhkan. Kegiatan distribusi dilakukan agar barang atau jasa dapat tersedia di tempat, waktu, dan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Menurut Sofjan Assauri, distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen,

¹⁰ Karim, A. A. (2012), *Ekonomi Mikro Islami*, hlm. 25-28.

¹¹ An-Nabhani, T. (2002), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Al-Nidham Al-Iqtishadi fil islam)*, hlm. 165-168.

sehingga produk tersebut dapat sampai kepada konsumen pada waktu dan tempat yang tepat.

2. Jenis dan Fungsi Pestisida

Pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang digunakan dalam kegiatan pertanian untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT). Penggunaan pestisida bertujuan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hama, penyakit, gulma, maupun organisme pengganggu lainnya.¹² Berdasarkan organisme sasaran, pestisida dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:¹³

- a. Insektisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama dari kelompok serangga yang menyerang tanaman.
- b. Fungisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan.
- c. Herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu yang tumbuh di sekitar tanaman budidaya.
- d. Rodentisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat, terutama tikus yang dapat merusak tanaman dan hasil pertanian.
- e. Akarisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan tungau yang menyerang tanaman.
- f. Nematisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan nematoda yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, terutama pada bagian akar.²

B. Implementasi Distribusi Pestisida Kepada Petani Padi Dan Petani Sawit Di Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil wawancara mengenai keadilan distribusi pestisida kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas, dapat diketahui bahwa distribusi pestisida secara umum telah memberikan akses kepada petani melalui keberadaan kios dan toko pertanian. Namun, keadilan distribusi masih menghadapi beberapa persoalan.

Secara teoritis, implementasi distribusi pestisida kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas dapat dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edward III, terutama melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, teori distribusi digunakan untuk melihat ketepatan sasaran, jumlah, jenis, waktu, prosedur, dan

¹²Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida*, Pasal 1.

¹³Djojosumarto, *Pestisida dan Aplikasinya* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), hlm. 21–25.

pengawasan.¹⁴ Dari aspek akses, petani yang berada dekat dengan kios atau toko pertanian cenderung lebih mudah memperoleh pestisida dibandingkan petani yang berada di lokasi yang jauh.¹⁵

Dari aspek ketersediaan, pestisida yang umum digunakan relatif mudah ditemukan, sedangkan beberapa jenis tertentu terkadang mengalami kekosongan. Dari aspek harga, kemampuan ekonomi petani menjadi faktor penting dalam menentukan kemampuan memperoleh pestisida sesuai kebutuhan. Harga pestisida yang meningkat dapat meningkatkan biaya produksi maupun biaya pemeliharaan usaha tani. Dari aspek pelayanan, pengecer mempunyai peran penting dalam membantu petani memperoleh pestisida sekaligus memberikan informasi mengenai produk. Namun, kualitas dan kelengkapan informasi yang diberikan perlu terus ditingkatkan.¹⁶ Dengan demikian, keadilan distribusi pestisida di Kabupaten Sambas dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemerataan akses, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kualitas pelayanan kepada petani padi dan petani sawit.

C. Keadilan dalam Distribusi Pestisida Ditinjau dari Aspek Akses, Ketersediaan, Harga, dan Pelayanan kepada Petani Padi dan Petani Sawit di Kabupaten Sambas

Keadilan dalam distribusi pestisida merupakan kondisi ketika petani memperoleh kesempatan yang layak dan proporsional untuk mendapatkan pestisida sesuai dengan kebutuhan usaha taninya. Keadilan distribusi tidak hanya berkaitan dengan tersalurnya pestisida dari distributor kepada petani, tetapi juga mencakup kemudahan akses, ketersediaan produk, keterjangkauan harga, serta pelayanan yang diterima petani.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap petani padi, petani sawit, dan pihak yang terlibat dalam distribusi pestisida di Kabupaten Sambas, diketahui bahwa distribusi pestisida secara umum telah berjalan melalui kios atau toko pertanian. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa keadilan distribusi belum sepenuhnya optimal.

¹⁴George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), hlm. 9–10.

¹⁵ Darma Irawan dan Laila Nuzuliyah, “Analisis Usahatani Padi Menggunakan Pestisida Nabati dan Pestisida Sintetis dalam Program IPDMIP di Desa Sentebang Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas,” 2022.

¹⁶Pemerintah Kabupaten Sambas, “Kompilasi Data Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas,” Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas, 2024.

KESIMPULAN

Implementasi Distribusi Pestisida Pada Petani Padi dan Sawit di Kabupaten Sambas dalam Perspektif Ekonomi Syariah. adapun hasil kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

1. Implementasi distribusi pestisida kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas secara umum telah berjalan, tetapi aspek pemerataan akses, keterjangkauan harga, ketersediaan produk, serta pemerataan informasi masih menjadi bagian penting dalam mewujudkan distribusi pestisida yang berkeadilan.
2. Keadilan dalam distribusi pestisida ditinjau dari aspek akses, ketersediaan, harga, dan pelayanan kepada petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas dapat dikatakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pemerataan akses, stabilitas ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kualitas pelayanan kepada petani padi dan petani sawit.
3. Faktor yang mendukung dan menghambat implementasi distribusi pestisida yang berkeadilan bagi petani padi dan petani sawit di Kabupaten Sambas faktor yang mendukung implementasi distribusi pestisida yang berkeadilan di Kabupaten Sambas meliputi tersedianya kios atau toko pertanian, kelancaran pasokan dari distributor, adanya kebutuhan petani, tersedianya informasi, dan pengalaman petani. Sementara itu, faktor yang menghambat meliputi keterbatasan ketersediaan jenis pestisida, harga yang relatif tinggi, jarak dan biaya transportasi, keterbatasan informasi teknis, serta perbedaan kemampuan ekonomi petani. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan distribusi pestisida yang berkeadilan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, distributor, pengecer, penyuluh, kelompok tani, maupun petani itu sendiri. Distribusi yang berkeadilan perlu diarahkan agar petani padi dan petani sawit memiliki kesempatan yang lebih merata untuk memperoleh pestisida yang sesuai kebutuhan, dengan harga yang terjangkau dan pelayanan serta informasi yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, G. A. (1970). *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*. *Quarterly Journal of Economics*.
- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Al-Mubarak, M. (2004). *Sistem Ekonomi Islam: Pasar dan Intervensi Pemerintah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- An-Nabhani, T. (2002). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Al-Nidham Al-Iqtishadi fil Islam)*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2025). *Kabupaten Sambas Dalam Angka 2025*. Sambas: BPS.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2024). *Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2024*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. (2024). *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sambas Semester I 2024*. Sambas: Disdukcapil Kabupaten Sambas.
- Downey, W. D., & Erickson, S. P. (1992). *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. Academy of Management Review.
- FAO. (2017). *International Code of Conduct on Pesticide Management: Guidelines on Mainstreaming Gender in Pesticide Management*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Hayami, Y., & Kikuchi, M. (1981). *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change*. University of Tokyo Press.
- Huda, N., dkk. (2015). *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Taimiyah. (1983). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Kairo: Darul Sya'b.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Kahf, M. (1992). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: Muslim Student Association.
- Khan, S. A., dkk. (2021). *Green Supply Chain Management Practices and Sustainable Performance: An Islamic Perspective*. Journal of Islamic Marketing.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri – Agama per Kabupaten/Kota*. Jakarta: Ditjen Dukcapil.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Llewellyn, O. A. (2003). *The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law. In Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Harvard University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mishra, A. K., dkk. (2000). *Information Asymmetry and Midstream Supply Chain Relationships*. Journal of Agricultural and Applied Economics.
- Mubyarto. (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad. (2014). *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Pimentel, D. (2005). *Environmental and Economic Costs of the Application of Pesticides Worldwide. Integrated Pest Management*. Springer, Dordrecht.

- Polres Sambas & Inspektorat. (2025). *Kasus Tindak Pidana Korupsi APBDes Desa Tebas Kuala Mengenai Penggelapan Pajak Desa dan Dana Desa*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarkis, J., dkk. (2011). *An Organizational Theoretic Review of Green Supply Chain Management Literature*. International Journal of Production Economics.
- Scott, J. C. (1977). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Nurdin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- George C. Edwards III, (1980), *Implementing Public Policy*, Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press,
- Budi Winarno, (2012), *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS,
- Sofjan Assauri, (2011), *Manajemen Pemasaran: Dasar, Konsep dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers,
- Fandy Tjiptono, (2015), *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida*, Pasal 1.
- Djojosumarto, *Pestisida dan Aplikasinya* (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2008), hlm. 21–25.
- Badan Standardisasi Nasional, SNI 7313:2008 *Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian*, (Jakarta: BSN, 2008).